



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BapendaKotim

Goes to Digital

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur



BAPENDA
KAB.KOTAWARINGIN TIMUR

RENJA

RENCANA KERJA

Tahun **2024**

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0294 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
 26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Memutuskan :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- Bab VI Penutup.

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. RSUD dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu;
48. Kecamatan Telaga Antang; dan
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

- KETIGA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 07 Agustus 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan penyusunan perencanaan tahunan untuk tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang sedang disusun, bertujuan untuk memberikan arah/pedoman terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2024.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang dibidang keuangan khususnya terkait pendapatan daerah, dalam dokumen Rencana Kerja ini berusaha untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini. Akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga dalam pelaksanaannya nanti senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran serta memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sampit, 07 Agustus 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,


Ramasansyah, S.E., M.Ec.Dev.
Pembina Tingkat I

NIP. 197409021994031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	50
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	53
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB V PENUTUP	94

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	11
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	13
Tabel 2.3	Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022	16
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022	20
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022	21
Tabel 2.6	Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Antara Tahun 2021 dan Tahun 2022	24
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022	26
Tabel 2.8	Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022	26
Tabel 2.9	Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	30
Tabel 2.10	Target Pendapatan dan Rencana Belanja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	31

Tabel 2.11	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur	32
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	47
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	49
Tabel 2.13	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	50
Tabel 2.14	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur	54
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur	67
Tabel 4.1	Rincian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	69
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur	74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Dimana selanjutnya RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Terpilih Tahun 2022-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Demi mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam beberapa misi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada salah satu misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)”

Dimana untuk mencapai misi di atas, diperlukan perencanaan yang baik, sistematis dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 untuk dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024, yang mengarah pada 3 sasaran prioritas yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah; (2) Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah; dan (3) Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- s. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
- z. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
- aa. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);
- bb. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
- b. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Pada bagian ini juga menguraikan rencana kerja dan pendanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah secara detail dan terperinci.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ini menyajikan target dan realisasi kinerja dari sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), pendapatan dan belanja selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Adapun dasar pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didapatkan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dengan indikator “Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” tidak termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022, walaupun termuat dan ada targetnya sesuai di dokumen Renstra Bapenda Kab. Kotim Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan dalam proses pencapaian realisasi tujuan tersebut tidak bisa dikendalikan secara penuh oleh Bapenda Kab. Kotim dan sangat bergantung pada pencapaian realisasi PAD lainnya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan dalam pencapaian target tujuan tersebut yaitu Bapenda Kab. Kotim harus terus berupaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah tiap tahunnya. Adapun untuk target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah	566.955.071.300,00	303.057.298.734,79	53,45
Pajak Daerah	406.403.805.000,00	97.431.120.690,00	23,97
Retribusi Daerah	16.437.473.800,00	11.327.463.439,00	68,91
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.086.047.900,00	12.809.375.699,00	105,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.027.744.600,00	181.489.338.906,79	137,46

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 303.057.298.734,79 dari target Rp. 566.955.071.300,00 dengan persentase capaian 53,45%. Sedangkan pajak daerah tahun 2022 sebagai salah satu komponen penyumbang PAD terealisasi sebesar Rp. 97.431.120.690,00 dari target Rp. 406.403.805.000,00 dengan persentase capaian 23,97%. Adapun rumus untuk perhitungan

realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu “Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100,00\% \\ &= \frac{\text{Rp. 97.431.120.690,00}}{\text{Rp. 303.057.298.734,79}} \times 100,00\% \\ &= 32,15\% \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka diperoleh realisasi indikator “Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” sebesar 32,15% dengan capaian realisasi 102,94% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 31,23%. Hasil ini masuk kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”** yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 sudah memenuhi target bahkan lebih dan melampaui ekspektasi sebagaimana target yang telah ditetapkan baik dalam Dokumen Renstra Bapenda Kab. Kotim maupun RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026. Capaian realisasi tujuan yang sangat tinggi ditahun 2022 ini harus terus dipertahankan oleh Bapenda Kab. Kotim dengan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pajak daerah pada tahun-tahun berikutnya. Harapannya pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah dapat terealisasi lebih optimal dan mampu mencapai bahkan lebih dari target Tujuan Bapenda Kab. Kotim yang telah ditetapkan. Adapun untuk target dan realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Tujuan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31,23%	32,15%	102,94%	Sangat Tinggi

Adapun target dan realisasi dari 3 (tiga) Sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah cara untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dengan kebutuhan kedalam pelayanan saat ini. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat per tahun. Tahapan Survei dilakukan sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya dan Tarif.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana.

Namun dalam pelaksanaan survei yang dilakukan hanya menggunakan 8 di atas, unsur Biaya dan Tarif tidak digunakan karena dalam pelayanan tidak ada tambahan biaya atau (gratis), dan kemudian menambahkan 3 unsur yaitu:

1. Perbandingan Kualitas Pelayanan dengan Tahun Lalu.
2. Ketepatan Jadwal Pelayanan.
3. Kenyamanan dan Keamanan Dalam Pelayanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

NILAI PRESEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 11 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	HASIL SKOR	KETERANGAN
1	IKM Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,50	Januari s/d Desember 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil skor pada IKM Tahun 2022 sebesar 83,50 (*Delapan Puluh Tiga Koma Lima Puluh*) dengan capaian persentase 100,60% dari target nilai skor awal yang ditetapkan yaitu 83,00. Pencapaian IKM pada tahun 2022 ini masuk kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”** dan merupakan yang tertinggi bagi Bapenda Kab. Kotim dalam empat tahun terakhir saat mulai dilakukannya SKM, dimana kinerja unit pelayanan pada tahun 2022 berada dalam mutu pelayanan (B) dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 s/d 88,30. Pencapaian nilai SKM yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelayanan di Kantor Bapenda Kab. Kotim telah mengalami peningkatan dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang bertugas pada bagian pelayanan. Di bawah ini tabel dan grafik mengenai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terkait Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,00 (BAIK)	83,50 (BAIK)	100,60%	Sangat Tinggi

Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator : Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk mengawasi pemerintah daerah. Korsupgah ini diluncurkan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tanggal 28 Februari 2014. Program tersebut merupakan lanjutan kegiatan Korsupgah yang telah dilakukan sejak 2012 yang melakukan supervisi pada pemerintah daerah dan pelayanan publik pada beberapa kantor pertanahan dan kantor imigrasi. Kegiatan Korsupgah ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana amanat UU No. 30 Tahun 2002, khususnya pasal 6, 7, 8 dan 14.

Adapun untuk kegiatan Korsupgah oleh KPK RI di Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Tahun 2022 terdapat 8 area yang menjadi proses penilaian, antara lain:

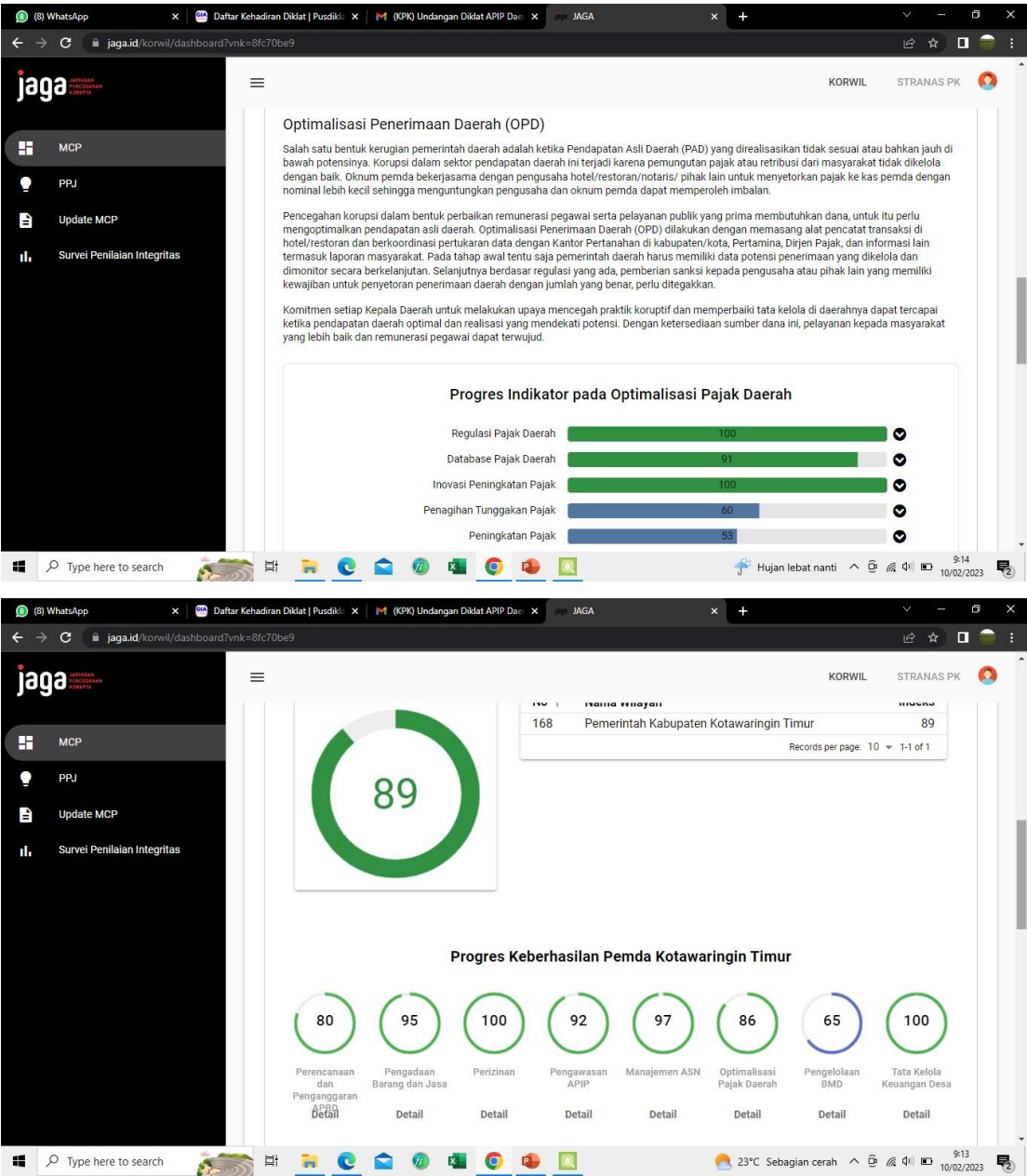
1. Perencanaan dan Penganggaran.
2. Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Perizinan.
4. Pengawasan APIP.
5. Manajemen ASN.

6. Optimalisasi Pajak Daerah.
7. Manajemen Aset Daerah.
8. Tata Kelola Keuangan Desa.

Dari 8 area penilaian di atas, area no. 6 yaitu Optimalisasi Pajak Daerah menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam proses penilaiannya Bapenda Kab. Kotim diminta untuk menyerahkan data pelaporan sebagai indikator penilaian setiap 3 (tiga) bulan sekali, antara lain:

1. Regulasi Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Database Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Basis Data Potensi Pajak Daerah Pada Aplikasi, dimana data yang dimaksud berupa screenshot aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pajak daerah.
 - b. Basis Data Piutang Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa screenshot basis data piutang pajak daerah.
3. Inovasi Peningkatan Pajak, terdiri dari:
 - a. Usulan Inovasi, dimana data yang dimaksud berupa usulan inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang telah dibuat dan telah dilaksanakan dalam tahun berjalan.
 - b. Laporan Progres Inovasi, dimana data yang dimaksud berupa laporan hasil progres dari pelaksanaan inovasi yang telah diusulkan sebelumnya.
4. Penagihan Tunggal Pajak, terdiri dari:
 - a. Laporan Tunggal Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa data tunggal dari beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2.
 - b. Data Piutang Pajak Daerah, dimana data yang dimaksud berupa data piutang dari beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan PBB-P2.
5. Peningkatan Pajak yaitu Realisasi Pajak Daerah Setiap Bulan, dimana data yang dimaksud berupa data realisasi pendapatan pajak daerah dalam setiap bulannya dan dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah setiap bulan pada tahun sebelumnya.

Data-data pelaporan di atas disampaikan ke Inspektorat Kab. Kotim selaku koordinator dalam bentuk *softcopy* untuk selanjutnya dikumpulkan bersama data-data area penilaian lainnya, kemudian data-data tersebut akan diolah dan dikompilasi ditingkat provinsi serta diinput ke aplikasi *jaga.id*. Data-data yang sudah diinput ke aplikasi *jaga.id* inilah yang akan diberi penilaian oleh pihak KPK RI dan hasil penilaiannya ditampilkan di laman aplikasi tersebut. Adapun untuk hasil penilaian yang diperoleh Bapenda Kab. Kotim pada triwulan IV tahun 2022 untuk Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah dapat dilihat 2 (dua) tampilan screenshot dari laman aplikasi *jaga.id* di bawah ini.



Dari screenshot di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan hasil Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2022 mendapat nilai IPK / MCP sebesar 86,00 (delapan puluh enam) dengan capaian persentase 122,86% dari target awal yang ditetapkan yaitu 70,00. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga Bapenda Kab. Kotim masuk ke dalam area penilaian Korsupgah KPK RI dan hasilnya bisa dikatakan sangat memuaskan dengan kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”** karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun dari 5 jenis data pelaporan yang dinilai, ada 3 jenis data yang memperoleh penilaian sangat baik yaitu nilai diatas 90,00 yaitu Regulasi Pajak Daerah, Database Pajak Daerah dan Inovasi Peningkatan Pajak. Sedangkan untuk 2 jenis data lainnya memperoleh nilai dengan kategori sedang yaitu Penagihan Tunggakan Pajak diangka 60,00 dan Peningkatan Pajak Daerah diangka 53,00. Belum optimalnya nilai 2 jenis data terakhir inilah yang perlu jadi perhatian dan adanya upaya tindak lanjut oleh Bapenda Kab. Kotim agar nilainya dapat terus meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya pada tahun 2023. Di bawah ini tabel dan grafik mengenai hasil penilaian Korsupgah KPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari area penilaian Optimalisasi Pajak Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Indeks Pencegahan Korupsi / *Monitoring Control for Prevention (MCP)* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Terkait Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	70,00	86,00	122,86%	Sangat Tinggi

Sasaran 3 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah

Indikator : Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah merupakan sasaran kinerja paling utama Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang diharapkan mampu berkontribusi untuk menaikkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Terdapat 11 jenis pajak daerah dan 1 jenis retribusi daerah yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim. Terdapat 1 jenis retribusi daerah yang masih dikelola Bapenda Kab. Kotim yaitu Retribusi Jasa Usaha berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan. Adapun Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ada sebanyak 11 jenis pajak yang meliputi:

- 1. Pajak Hotel;
- 2. Pajak Restoran;
- 3. Pajak Hiburan;
- 4. Pajak Reklame;
- 5. Pajak Penerangan Jalan Umum;
- 6. Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam;

- 7. Pajak Parkir;
- 8. Pajak Air Bawah Tanah;
- 9. Pajak Sarang Burung Walet;
- 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
dan
- 11. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Pada Tahun 2022 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim sebesar Rp. 406.553.805.000,00, terdiri dari target pajak daerah sebesar Rp. 406.403.805.000,00 dan retribusi daerah sebesar Rp. 150.000.000,00. Adapun untuk realisasinya secara keseluruhan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 97.817.958.456,00 atau 24,06% secara persentase capaian. Capaian kinerja ini tentunya jauh dari target yang diharapkan, dimana akan menjadi catatan penting dan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun 2023. Di bawah ini tabulasi antara target, realisasi dan persentase capaian penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab Bapenda Kab. Kotim selama tahun 2022 yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2022

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	406.553.805.000,00	97.817.958.456,00	24,06
Pajak Daerah	406.403.805.000,00	97.431.120.690,00	23,97
Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.063.927.300,00	102,13
Pajak Restoran	6.550.000.000,00	7.009.238.595,00	107,01
Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.445.307.367,00	122,27
Pajak Reklame	1.055.000.000,00	1.197.204.743,00	113,48
Pajak Penerangan Jalan	33.500.000.000,00	34.478.514.301,00	102,92

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Parkir	300.000.000,00	308.929.346,00	102,98
Pajak Air Bawah Tanah	250.000.000,00	289.121.201,00	115,65
Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	534.092.307,00	106,82
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.848.940.345,00	123,26
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	10.500.000.000,00	11.325.055.532,00	107,86
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	347.248.805.000,00	34.930.789.653,00	10,06
Retribusi Daerah	150,000,000.00	117.135.638,00	78,09
Retribusi Jasa Usaha	150,000,000.00	117.135.638,00	78,09
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	269.702.128,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	3.389.181,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	51.350.192,00	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	2.014.976,00	-

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

URAIAN	TARGET (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	19.217.961,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	2.048.752,00	-
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	4.305.280,00	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	3.209.437,00	-
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	25.309.091,00	-
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	158.857.258,00	-
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	269.702.128,00	-
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB- P2)	-	3.389.181,00	-

Adapun untuk mengetahui capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah” pada tahun 2022 diperlukan data realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 sebagai data pembandingan. Tabel di bawah ini akan menggambarkan pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2021 ke tahun 2022 baik per tiap jenis pajak daerah maupun secara keseluruhan sebagai berikut.

Tabel 2.6
Perbandingan Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Antara Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Hotel	2.162.015.880,00	3.063.927.300,00	41,72
2	Pajak Restoran	5.191.549.042,00	7.009.238.595,00	35,01
3	Pajak Hiburan	908.537.508,00	2.445.307.367,00	169,15
4	Pajak Reklame	1.260.071.683,00	1.197.204.743,00	-4,99
5	Pajak Penerangan Jalan	26.885.155.969,00	34.478.514.301,00	28,24
6	Pajak Parkir	264.578.550,00	308.929.346,00	16,76
7	Pajak Air Bawah Tanah	275.088.700,00	289.121.201,00	5,10
8	Pajak Sarang Burung Walet	452.522.399,00	534.092.307,00	18,03
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.046.122.425,00	1.848.940.345,00	-9,64

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Pajak Bumi dan Bangunan	9.465.421.127,00	11.325.055.532,00	19,65
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.600.537.323,00	34.930.789.653,00	110,42
Total (Rp.)		65.511.600.606,00	97.431.120.690,00	48,72

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan pada tahun 2022 berada diangka 48,72 (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua) dari target awal yang ditetapkan yaitu 5,00% dengan persentase capaian 974,40% yang berarti masuk kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”**. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang sangat signifikan ini merupakan kompilasi pertumbuhan 11 jenis pajak daerah yang bervariasi, dimana ada 9 jenis pajak yang mengalami pertumbuhan yang positif yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan 2 jenis pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun capaian pertumbuhan negatif dari Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2022 tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan secara keseluruhan, karena realisasi pajak daerah tahun 2022 jauh meningkat dibandingkan tahun 2021. Walaupun demikian, pertumbuhan negatif 2 jenis pajak tersebut tetap perlu jadi perhatian dan adanya upaya tindak lanjut oleh Bapenda Kab. Kotim agar pada tahun 2023 dapat mencapai target dan mengalami pertumbuhan yang positif daripada realisasi tahun 2022. Di bawah ini tabel mengenai hasil penilaian Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00	48,72	974,40%	Sangat Tinggi

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran/IKU yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2022 dari sisi keuangan untuk anggaran belanjanya sebesar Rp. 15.839.524.289,00. Data rincian anggaran dan realisasi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8

Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.360.941.576,00	11.605.680.077,00	80,81	83,36
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.500.514.870,00	7.090.518.950,00	83,41	85,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.500.514.870,00	7.090.518.950,00	83,41	85,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	527.130.000,00	244.784.441,00	46,44	47,39
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	121.800.000,00	117.410.000,00	96,40	100,00
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	405.330.000,00	127.374.441,00	31,42	31,57

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.210.213.200,00	1.716.495.724,00	77,66	78,91
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.056.000,00	31.346.300,00	78,26	80,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.942.400,00	293.500.000,00	97,85	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.370.800,00	-	-	-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.250.000,00	116.890.332,00	72,49	72,50
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.382.000,00	177.030.001,00	88,79	90,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000,00	43.800.000,00	97,33	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	175.000.000,00	172.823.600,00	98,76	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	256.350.000,00	207.979.840,00	81,13	82,36
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.862.000,00	673.125.651,00	67,32	68,48
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	372.794.400,00	314.500.000,00	84,36	87,18
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.000.000,00	314.500.000,00	96,77	100,00
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	47.794.400,00	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.985.819.106,00	1.777.811.861,00	89,53	98,22
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	4.635.000,00	46,35	46,50
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.831.600,00	267.586.999,00	88,36	90,12
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.672.987.506,00	1.505.589.862,00	89,99	100,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.470.000,00	461.569.101,00	60,38	62,27

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.420.000,00	185.090.400,00	50,93	53,22
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.160.000,00	221.412.850,00	73,03	74,90
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.890.000,00	55.065.851,00	56,25	56,70
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.596.858.000,00	3.030.026.539,00	84,24	85,39
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.596.858.000,00	3.030.026.539,00	84,24	85,39
Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	72.500.000,00	53.640.000,00	73,99	75,00
Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	538.730.000,00	262.175.698,00	48,67	49,88
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	451.888.000,00	363.648.068,00	80,47	81,56
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	300.000.000,00	298.000.000,00	99,33	45,00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.106.000.000,00	1.073.302.310,00	97,04	98,43
Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	190.220.000,00	169.296.661,00	89,00	91,05
Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	203.000.000,00	200.055.000,00	98,55	100,00
Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	289.520.000,00	263.371.000,00	90,97	91,88
Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	58.000.000,00	48.230.000,00	83,16	85,00
Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	126.000.000,00	92.697.802,00	73,57	73,65

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5
Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	116.000.000,00	115.520.000,00	99,59	100,00
Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	72.500.000,00	39.820.000,00	54,92	55,00
Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	72.500.000,00	50.270.000,00	69,34	70,00
TOTAL	17.957.799.576,00	14.635.706.616,00	81,50	83,77

Dari data di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalokasikan pembiayaan untuk 2 program, 7 kegiatan dan 33 sub kegiatan sebesar Rp. 17.957.799.576,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.635.706.616,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 81,50% dan capaian realisasi fisik sebesar 83,77%. Terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 ini walaupun masuk kriteria penilaian “Tinggi”, akan tetapi memang masih jauh dari target yang diharapkan yaitu diangka 90,00% atau lebih, dimana salah satu penyebab utamanya adalah tidak bisa direalisasikan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Bapenda Kab. Kotim selama 4 bulan dikarenakan keterbatasan kas daerah sehingga dijadikan piutang belanja tahun 2022 yang akan direalisasikan pada tahun 2023.

Rencana dan Target Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 untuk rencana dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan mengikuti Renstra Tahun 2021-2026 yang sedang disusun, khususnya untuk target tujuan dan sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun untuk target pendapatan Bapenda Kab. Kotim pada anggaran murni tahun 2023 yaitu Rp. 238.078.679.712,00 yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp. 237.928.679.712,00 dan retribusi daerah sebesar Rp. 150.000.000,00. Sedangkan untuk rencana belanja Bapenda Kab. Kotim pada anggaran murni tahun 2023 ditetapkan yaitu Rp. 18.761.782.300,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar

Rp. 16.718.982.300,00 dan belanja modal sebesar Rp. 2.042.800.000,00. Keterangan lebih jelasnya dapat yang dilihat pada tabel-tabel yang disajikan di bawah ini.

Tabel 2.9
Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah		Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31,24%
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	83,50 (Baik)
3		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	80,00
4		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%

Tabel 2.10
Target Pendapatan dan Rencana Belanja Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4	PENDAPATAN	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.078.679.712,00
4 . 1 . 01	Pajak Daerah	237.928.679.712,00
4 . 1 . 02	Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	238.078.679.712,00
5	BELANJA	
5 . 1	BELANJA OPERASI	16.718.982.300,00
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	9.110.926.820,00
5 . 2 . 02	Belanja Barang dan Jasa	7.608.055.480,00
5 . 2	BELANJA MODAL	2.042.800.000,00
5 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.042.800.000,00
	Jumlah Belanja	18.761.782.300,00
TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)		219.316.897.412,00

Tabel 2.11
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	2				KEUANGAN										
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP Badan	Poin	78	75	76	76	100,00	77	228	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kewajiban Administrasi Keuangan yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100,00	100	300	50,00
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1980	1980	1980	1980	100,00	1980	5940	50,00
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100,00	100	300	50,00
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160	160	160	160	100,00	160	480	50,00
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	24	24	24	100,00	24	72	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100,00	100	300	50,00
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	240	240	240	240	100,00	240	720	50,00
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	24	24	24	100,00	24	72	50,00
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	8	8	8	100,00	8	24	50,00
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6000	6000	6000	6000	100,00	6000	18000	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1200	1200	1200	1200	100,00	1200	3600	50,00
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7500	7500	7500	7500	100,00	7500	22500	50,00
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3600	3600	3600	3600	100,00	3600	10800	50,00
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	120	120	120	120	100,00	120	360	50,00
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	48	48	48	100,00	48	144	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100,00	100	300	50,00
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	8	8	8	100,00	8	24	50,00
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	12	12	100,00	12	36	50,00
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100,00	100	300	50,00
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1200	1200	1200	1200	100,00	1200	3600	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	120	120	120	120	100,00	120	0	50,00
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	960	960	960	960	100,00	960	360	50,00
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	100,00	100	2880	50,00
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36	36	36	100,00	36	300	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12	12	12	12	100,00	12	108	50,00
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	120	120	120	120	100,00	120	36	50,00
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	360	50,00
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Tercapainya Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	300	50,00
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	100,00	4	300	50,00
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta	Dokumen	12	12	12	12	100,00	12	12	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah									
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	100,00	12	36	50,00
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	2	2	2	100,00	2	36	50,00
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	21600	21600	21600	21600	100,00	21600	6	50,00
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,	Laporan	12	12	12	12	100,00	12	64800	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	24	24	24	24	100,00	24	36	50,00
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	96000	96000	96000	96000	100,00	96000	72	50,00
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	48	48	48	48	100,00	48	288000	50,00
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	1200	1200	1200	1200	100,00	1200	144	50,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1200	1200	1200	1200	100,00	1200	3600	50,00
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	96	96	96	96	100,00	96	3600	50,00
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	120	120	120	120	100,00	120	288	50,00

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut

- a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Tujuan : Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah
- Strategi : Meningkatkan keahlian dan profesionalisme fiskus, didukung dengan arah kebijakan antara lain:
 - a. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu fiskus seperti penilai, pemeriksa, penyuluh dan juru sita pajak daerah

- b. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi fiskus melalui diklat dan bimtek
- Strategi : Meningkatkan mutu pelayanan pajak daerah, didukung dengan arah kebijakan antara lain:
 - a. Penyediaan media informasi serta wadah penyampaian kritik dan saran terkait pelayanan pajak daerah
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan mutu pelayanan pajak daerah
- Sasaran : Meningkatnya pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel
- Strategi : Meningkatkan kualitas perencanaan, inovasi dan pelaporan pengelolaan pajak daerah secara tepat dan kontinu, didukung dengan arah kebijakan antara lain:
 - a. Penyusunan target dan potensi pajak daerah sesuai dengan kondisi riil di lapangan
 - b. Pengembangan inovasi pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi
 - c. Penyusunan dan pelaporan pajak daerah secara berkala dan dapat diakses secara *online* dan *realtime*
 - d. Penyelesaian piutang pajak daerah melalui penagihan dan penghapusan
- Sasaran : Meningkatnya penerimaan pajak daerah
- Strategi : Intensifikasi pajak daerah, didukung dengan arah kebijakan antara lain:
 - a. Penyusunan, revisi, sosialisasi, pembinaan dan penegakan hukum peraturan pajak daerah
 - b. Pemasangan alat pemantau transaksi dan pelaksanaan verifikasi lapangan sebagai dasar penetapan tarif pajak daerah
 - c. Penyediaan sarana pelayanan dan konsultasi pajak daerah baik secara daring maupun luring

- d. Penyelesaian keberatan, penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah secara intensif dan persuasif

Strategi : Ekstensifikasi pajak daerah, didukung dengan arah kebijakan antara lain:

- a. Penggalian potensi objek pajak baru dan pemutakhiran data objek pajak lama secara kontinu
- b. Pendataan dan penilaian objek PBB non standar secara optimal

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tupoksinya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan khususnya dibidang pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun struktur organisasinya sesuai kebutuhannya. Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan.
 - b. Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pelayanan; dan
 - Sub Bidang Penetapan.
 - c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Piutang, terdiri dari:
 - Sub Bidang Penagihan; dan
 - Sub Bidang Pemeriksaan.
 - d. Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - Sub Bidang Pengembangan dan Pengkajian.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

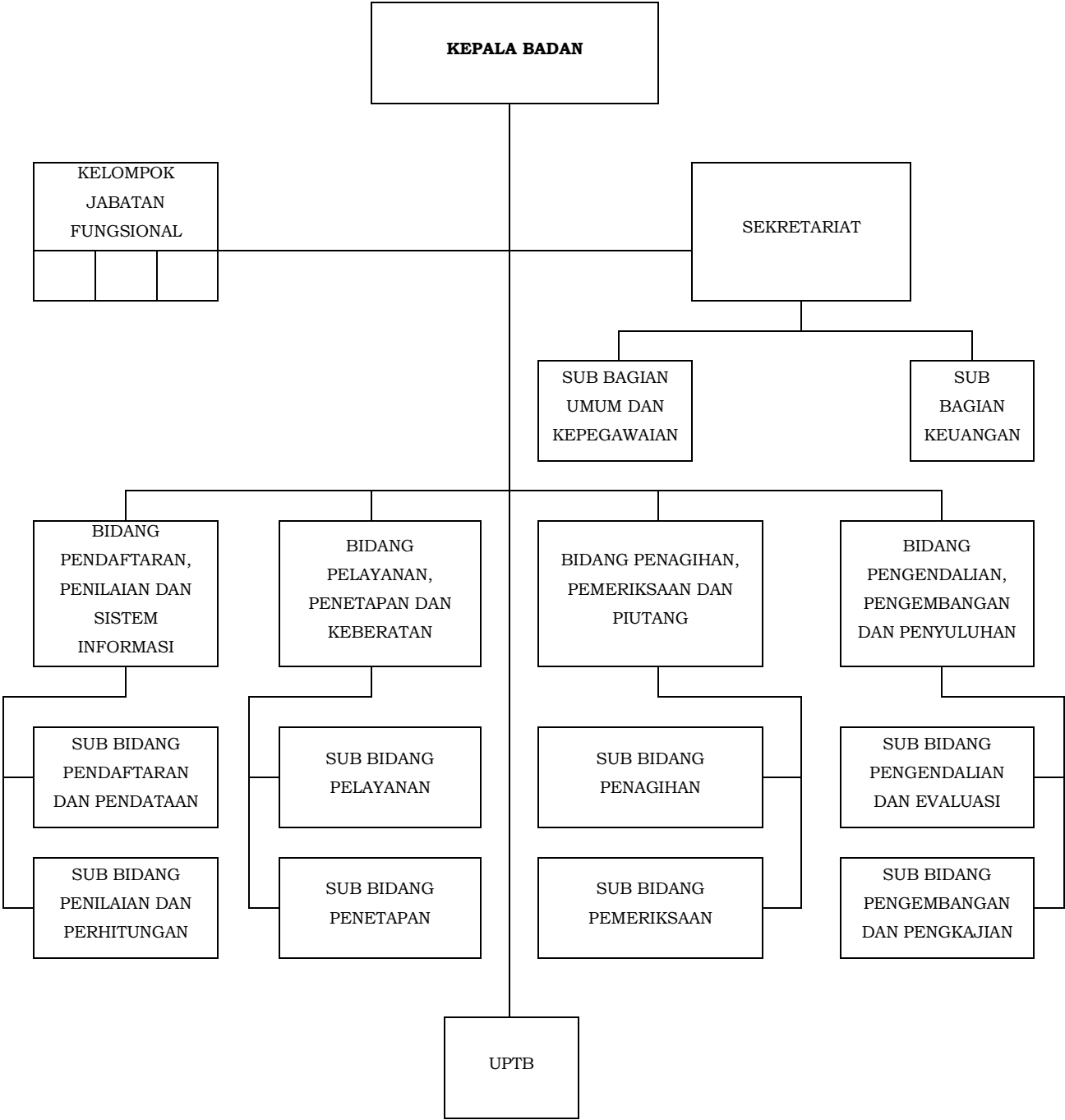
5. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. Penyelenggaraan penatausahaan Badan;
 - e. Pembinaan kepegawaian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;

- b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Menyelenggarakan penatausahaan Badan;
- e. Membina kepegawaian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Badan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik apabila ditunjang oleh sumber daya yang memadai, baik yang berupa sumber daya manusia, aset, maupun sumber daya pendukung lainnya. Mencermati keadaan hingga saat ini, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Bapenda Kab. Kotim saat ini sudah sangat mencukupi namun demikian untuk menunjang tupoksi dalam hal pengelolaan pajak daerah belum bisa optimal disebabkan belum memiliki aparatur fungsional seperti penilai pajak, juru sita, pemeriksa dan penyuluh pajak yang bersertifikasi sehingga akan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugasnya. Petugas-petugas tersebut tidak bisa dimiliki secara cepat karena merupakan pegawai fungsional khusus yang pengadaan pegawainya maupun pendidikannya merupakan kewenangan dari instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam hal ini Bapenda Kab. Kotim hanya bisa mengusulkan dan untuk mengatasi sementara kekosongan tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai yang ada untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pendidikan lainnya serta dibuat Surat Keputusan Bupati sebagai dasar penugasan.

Secara umum sarana prasarana yang ada juga sudah mencukupi, akan tetapi untuk menjawab tuntutan jaman untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat, Bapenda Kab. Kotim juga harus meningkatkan pelayanannya dengan mengembangkan pelayanan pajak daerah secara online. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi serta validasi data harus dilakukan dan dikerjakan secara terus menerus.

Oleh karena itu, dengan dukungan semua sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang bisa dikatakan cukup memadai tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan akan dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) secara memuaskan dengan realisasi dan proyeksi yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	-	-	83,00	83,50	84,00	84,50	83,50	-	84,00	84,50	-
2	Indeks Pencegahan Korupsi / <i>Monitoring Control for Prevention (MCP)</i> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	-	-	70,00	80,00	90,00	95,00	86,00	-	90,00	95,00	-
3	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00	48,72	-	5,00	5,00	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya mampu melaksanakan pelayanan secara optimal, kondisi ini tidak lepas dari berbagai permasalahan yang mendasar terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga harus disusun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan dengan tepat. Dalam hal ini permasalahan yang menjadi titik kelemahan yang dihadapi selama ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.13
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelayanan pajak daerah	Belum optimalnya SDM pengelola pajak daerah	Belum tersedianya jabatan fungsional tertentu fiskus seperti penilai, pemeriksa, penyuluh dan juru sita
			Masih kurangnya pengetahuan fiskus dalam pengelolaan pajak daerah
		Belum optimalnya standar pelayanan pajak daerah	Masih minimnya media informasi pajak daerah kepada masyarakat
			Belum terpenuhinya petugas pelayanan yang kompeten

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2	Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah	Belum optimalnya perencanaan target, potensi dan inovasi pengelolaan pajak daerah	Belum tersedianya data yang valid untuk penyusunan target dan potensi pajak daerah
			Masih perlunya pengembangan dan pengadaan aplikasi pengelolaan pajak daerah (inovasi)
		Belum optimalnya pengembangan inovasi dan penyusunan data pelaporan pajak daerah	Belum tersedianya mekanisme yang sistematis dan <i>realtime</i>
			Masih tingginya piutang pajak daerah
3	Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya penggalan penerimaan pajak daerah dari objek pajak yang telah terdaftar	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat pembayaran pajak daerah
			Kurangnya kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam membayar pajak daerah
			Masih terbatasnya sarana pelayanan konsultasi pajak daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Belum ditetapkan sanksi dan penegakan hukum terhadap penunggak pajak daerah
		Belum optimalnya penggalan sumber objek pajak baru	Belum tuntasnya kegiatan pemutakhiran data pajak daerah dan belum tergalinya potensi pajak daerah baru
			Masih terdapatnya objek PBB non standar yang belum dinilai

Permasalahan-permasalahan yang dapat teridentifikasi tersebut menjadi isu strategis yang akan menjadi dasar bagi penentuan prioritas yang harus ditangani melalui rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran, pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah, serta belum ditetapkan sanksi dan penegakan hukum terhadap penunggak pajak daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan database pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Belum tuntasnya kegiatan pemutakhiran data.
4. Belum optimalnya pengembangan inovasi.

5. Belum adanya Aparatur Sipil Negara yang memiliki sertifikasi keahlian dalam pengelolaan pajak, terutama untuk juru sita, penyuluh pajak dan masih kurangnya pengetahuan fiskus dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Minimnya media informasi Pajak Daerah Kepada Masyarakat dan profesionalisme petugas pelayanan yang kompeten.
7. Masih kurangnya sinergitas serta koordinasi antar SOPD dan instansi terkait.

Isu-isu penting ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan pembenahan yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam dokumen, Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Disamping itu, juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.14
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Timur

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kotim	Nilai LKIP Badan	79 Poin	9.036.968.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kotim	Nilai LKIP Badan	79 Poin	14.596.968.300	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kewajiban Administrasi Keuangan yang Terpenuhi	100%	5.871.446.820	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kewajiban Administrasi Keuangan yang Terpenuhi	100%	9.001.968.300	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980 Orang/ Bulan	5.871.446.820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980 Orang/ Bulan	9.001.968.300	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	600.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotim	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket	200.000.000	
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	400.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	1.222.640.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kotim	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	1.985.000.000	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	240 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	240 Paket	40.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	300.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotim	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	100.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6000 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6000 Paket	150.000.000	
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1200 Paket	150.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1200 Paket	150.000.000	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7500 Dokum	45.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7500 Dokum	45.000.000	
g	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3600 Paket	175.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotim	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3600 Paket	200.000.000	
h	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	225.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	250.000.000	
i	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	437.640.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	750.000.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kebutuhan	100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kebutuhan	100%	450.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Penunjang yang Terpenuhi			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Penunjang yang Terpenuhi			
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotim	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	400.000.000	
b	Pengadaan Mebel	Kab. Kotim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Kotim	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	50.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	1.329.990.680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	1.960.000.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	10.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	365.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	400.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	960 Laporan	954.990.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	960 Laporan	1.550.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100%	612.890.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotim	Persentase Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	100%	600.000.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	260.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	250.000.000	
b	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	255.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	250.000.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	120 Unit	97.890.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Kab. Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	120 Unit	100.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Kotim	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Kotim	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	3.765.000.000	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kotim	Persentase Tercapainya Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah	100%	0	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Kotim	Persentase Tercapainya Target Penerimaan Tiap Jenis Pajak Daerah	100%	3.765.000.000	
a	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	75.000.000	
b	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	200.000.000	
c	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	12 Laporan	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	12 Laporan	340.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kebijakan Pajak Daerah					Kebijakan Pajak Daerah			
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	200.000.000	
e	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	21600 Laporan	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	21600 Laporan	2.000.000.000	
f	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	150.000.000	
g	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Kotim	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	24 Obyek Pajak	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Kotim	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	24 Obyek Pajak	150.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
h	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	96000 Dokumen	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	96000 Dokumen	200.000.000	
i	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48 Layanan	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48 Layanan	75.000.000	
j	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200 Dokumen	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1200 Dokumen	100.000.000	
k	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1200 Dokumen	0	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1200 Dokumen	100.000.000	
l	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	96 Dokumen	0	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	96 Dokumen	75.000.000	
m	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian	120 Dokumen	0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Kotim	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian	120 Dokumen	100.000.000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Pengawasan Pajak Daerah					dan Pengawasan Pajak Daerah			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan pada awal tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ikut berpartisipasi dengan memberikan paparan dan pemahaman kepada para peserta terkait pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum dan pajak daerah secara khusus terutama PBB-P2. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga menyerahkan DHKP PBB-P2 Tahun 2023 kepada pihak kecamatan dan lurah/kepala desa di wilayahnya masing-masing untuk dapat ditindaklanjuti melalui sosialisasi dan penagihan. Secara umum tidak ada permintaan atau usulan khusus dari masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dilaksanakannya program dan kegiatan pada tahun 2024, hanya perlu peningkatan sosialisasi, penyuluhan dan aksi turun langsung ke lapangan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya untuk wilayah-wilayah yang letaknya jauh dari ibukota kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJM Nasional atau Rencana Strategis Nasional telah ditetapkan Visi Indonesia Tahun 2020-2024 adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun 4 (empat) pilar yang dimaksud antara lain:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Sedangkan 7 agenda pembangunan yang menjadi fokus utama untuk mencapai 4 (empat) pilar di atas yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 agenda pembangunan yang telah diuraikan di atas, pada poin g yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” bisa diartikan bahwa negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Selain itu, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.
2. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil.
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber.
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur akan mengemban amanah dalam mewujudkan poin 1 yaitu “reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas” dan difokuskan untuk meningkatkan kemandirian bangsa pada umumnya dan kemandirian daerah pada khususnya dengan selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur karena dapat membiayai pembangunan dengan sumber daya yang dimiliki sendiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan pendapatan dan membantu Bupati Kotawaringin Timur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa tidak ada lagi visi dan misi SOPD, maka penyusunan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Demi mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam beberapa misi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada salah satu misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)”

Dalam rangka mencapai Misi Kabupaten Kotawaringin Timur di atas, maka perlu menetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai SOPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, secara spesifik telah menetapkan tujuan organisasi yaitu **“Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**. Tujuan organisasi tersebut didukung dengan 3 sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah, Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah. Adapun untuk rincian indikator dan target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah		Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	31,24%
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Pajak Daerah	84,00 (Baik)
3		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Optimalisasi Pajak Daerah	90,00
4		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan skala prioritas serta usulan masyarakat yang didapat pada saat mengikuti Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur pada awal tahun 2023. Hal ini dikarenakan pagu anggaran belanja untuk tahun 2024 yang nilainya masih terbatas yang diberikan oleh Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga harus diperhitungkan secara cermat demi terakomodirnya semua kegiatan prioritas.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 131.535.100.864,00 yang terdiri dari pajak daerah Rp. 131.418.100.864,00 dan retribusi daerah 117.000.000,00. Target pendapatan tersebut masih dimungkinkan untuk mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, khususnya dari pencapaian realisasi pendapatan pada tahun 2023. Selain itu dengan adanya wabah penyakit *covid-19* yang saat ini masih melanda wilayah Indonesia yang berdampak pada seluruh aspek perekonomian nasional, termasuk sektor pendapatan para pelaku usaha dan warga negara yang menjadi wajib pajak.

Dari 11 jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat 3 jenis pajak yang menjadi andalan dan penyumbang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2024 yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Rincian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP.)
4	PENDAPATAN DAERAH	131.535.100.864,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.535.100.864,00
4.1.01	Pajak Daerah	131.418.100.864,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.500.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.900.000.000,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	550.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	30.000.000,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	5.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	900.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	765.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	750.000.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	10.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	15.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	250.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	10.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.100.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	700.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	0,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP.)
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	35.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	33.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	310.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	310.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	290.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	290.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	560.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	560.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.383.000.000,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	271.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	410.000.000,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	700.000.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	2.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	9.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	73.275.100.864,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.275.100.864,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	60.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	117.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	117.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	117.000.000,00

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan pendapatan

dan membantu Bupati Kotawaringin Timur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program utama dan pencapaian kinerja Bapenda Kab. Kotim sesuai dengan tupoksinya. Adapun kegiatan dan sub kegiatan dari program ini antara lain:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas 9 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyediaan Bahan/Material.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- Pengadaan Mebel.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas 3 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang bertujuan untuk memantapkan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan dari program ini yaitu “Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah” dengan sub kegiatan antara lain:

- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
- e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- f. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
- g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- h. Penetapan Wajib Pajak Daerah.

- i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
- j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
- k. Penagihan Pajak Daerah.
- l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
- m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah mengalami penyesuaian dan penambahan dari pagu anggaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 18.361.968.300,00 yang terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp. 9.001.968.300,00 serta untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 9.360.000.000,00. Adapun rincian rumusan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 beserta pagu anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						18.361.968.300,00							18.361.782.300,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						18.361.968.300,00							18.361.782.300,00	
	5.02	KEUANGAN						18.361.968.300,00							18.361.782.300,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.596.968.300,00						-	15.884.678.235,00	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.001.968.300,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.951.850.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1980 Orang/bulan	9.001.968.300,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		9.951.850.110,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	694.575.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				160 Paket	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		231.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	400.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		463.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.985.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.025.843.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				240 Paket	40.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		46.305.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	300.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		405.168.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		86.821.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6000 Paket	150.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		86.821.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1200 Paket	150.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		138.915.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7500 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		52.093.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3600 Paket	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		202.584.375,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		173.643.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	750.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		833.490.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	450.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	376.228.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	400.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		289.406.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	50.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		86.821.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.960.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.182.123.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		11.576.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				120 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		318.346.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				960 Laporan	1.550.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		1.852.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	654.058.125,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	250.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		306.770.625,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	250.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		231.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				120 Unit	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		115.762.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	3.765.000.000,00						-	2.477.104.065,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	3.765.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.477.104.065,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		81.033.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-govern- ment, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kadangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		81.033.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	340.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-govern- ment, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kadangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		289.406.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governmen, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		231.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				21600 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governmen, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		896.945.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Pening katan SDM aparatur bir okrasi,keter bukaan kompetensi Kalangan p rofessional dan Pening katan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pem erintahan	-		202.584.375,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				24 Obyek Pajak	150.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Pening katan SDM aparatur bir okrasi,keter bukaan kompetensi Kalangan p rofessional dan Pening katan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pem erintahan	-		115.762.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				96000 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		138.915.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				48 Layanan	75.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		81.033.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1200 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		81.033.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1200 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		115.762.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				96 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		81.033.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				120 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-governm ent, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4. Tata Kelola Pemerintahan	-		81.033.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	J U M L A H							18.361.968.300,00							18.361.782.300,00		

